RESUME

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS UMUM FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN PEMUKIMAN (ZULKIFLI, P2MH190101001)

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebutuhan terhadap perumahan juga telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan (Harahap, 2013), di mana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa Pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan (Murbaintoro, 2009)

2. PEMBAHASAN

Pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, ditujukan untuk : Pertama Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kedua mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur Ketiga Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional. Keempat menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidanglainnya. Dengan demikian sasaran pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk menciptakan lingkungan dan ruang hidup manusia yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang hakiki, yaitu agar terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, perlindungan, ketenangan, pengembangan diri, kesehatan dan keindahan serta kebutuhan lainnya dalam pelestarian hidup manusiawi.

Pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak pengembang dalam hal ini pengelola melakukan pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut dan mengelolanya sendiri, dengan biaya pengadaan yang murni berasal dari pihak pengembang sedangkan biaya pengelolaannya berasal dari iuran warga masyarakat (Subekti, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan kegiatan pada tahap purna/pasca transaksi yang meliputi layanan purna jual.

Setelah disahkannya Perda Kota Makassar No. 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman, Perda tersebut dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen perumahan, yang dalam hal ini adalah fasos dan fasum. Pada pasal 11 ayat (2) dan (3) Perda No. 9 Tahun 2011 ditegaskan bahwa prasarana, sarana dan utilitas wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Setelah dilakukan proses penyerahan, fasos dan fasum tersebut langsung diserahkan kepada SKPD teknis terkait sehingga SKPD-lah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasos dan fasum tersebut. Adapun SKPD teknis terkait.

3. KESIMPULAN

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Makassar terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman adalah dengan melakukan pengelolaan yaitu, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dengan melakukan perawatan agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh warga. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diserahkan oleh developer kepada Pemerintah Kota Makassar, maka pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Makassar melalui SKPD terkait, yang mana biaya pengelolaan sepenuhnya berasal dari APBD Kota Makassar. Namun tidak semua developer melakukan penyerahan kepada Pemda melainkan melakukan pengelolaan sendiri dan menjadi tanggung jawab dari pihak developer dan biaya pengelolaannya berasal dari iuran warga perumahan.